

PENDIDIKAN PERENCANAAN MENJELANG ERA ASIA-PASIFIK: Perlunya Fleksibilitas Pendidikan

Oleh
Pradono¹

ABSTRACT

Globalization in economy has resulted in economic interdependency on a global scale. Economic activities have experienced tertiary process, or activities characterized by the domination of service sector activities. Eventhough this phenomenon is more intensive in developed countries, its implications, nonetheless, will affect the developing countries. At a certain level developing countries will play and experience this new pattern. Developing countries should seize this momentum rightly . Human resources preparation through education is very essential in utilizing this momentum. Planning education is one important area in responding to the changing world. Some adjustments with new rethoric in education world is needed.

I. Pendahuluan

Salah satu perubahan besar di bidang ekonomi internasional adalah mulai beralihnya “teater” ekonomi dunia ke kawasan Asia-Pasifik dengan munculnya NICs (Korea, Taiwan, Singapura, Hong Kong) sebagai kekuatan baru ekonomi dunia, serta akan efektifnya APEC pada tahun 2020. Peralihan ini sudah pasti akan membawa suatu aturan-aturan baru yang berbeda dengan yang sekarang diberlakukan. Aturan dan nilai yang sekarang mendasari perilaku kita, akan dianggap kuno dan tidak akan dipakai lagi. Namun kita masih dapat menduga bahwa persoalan umat manusia secara umum masih akan tetap sama (bahkan mungkin akan semakin akut) seperti kurangnya sumberdaya, buruknya manajemen sampah, rusaknya lingkungan, dan lain-lain. Meskipun isu global akan mendominasi kehidupan manusia pada saat itu, namun dapat dipastikan bahwa isu lokal maupun nasional masih perlu diperhatikan.

Tulisan ini mencoba memberikan gambaran tentang dampak perubahan global kehidupan bersama manusia di masa mendatang bagi upaya penyiapan sumberdaya manusia perencanaan wilayah dan kota. Bagi para pendidik dan mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan sudah dapat dipastikan bahwa dampak perubahan global akan mempengaruhi upaya pembentukan manusia perencanaan dan program pendidikan. Adalah tanggung jawab dunia pendidikan untuk dapat membantu anak didik mengerti gerak perubahan ini dan posisi negara mereka dalam konfigurasi baru tersebut.

II. Perubahan Ekonomi Internasional

Perubahan terbesar dalam perekonomian dunia setelah Perang Dunia kedua adalah semakin tergantungnya ekonomi suatu negara dengan negara lain yang merupakan ciri pokok menyatunya

¹ Staf Pengajar Jurusan Teknik Planologi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung

perekonomian dunia ke dalam suatu *global economy*. Ini dicirikan dengan perubahan ekonomi dalam suatu negara, region, dan lokal yang semakin tergantung pada tingkat hubungan pada skala global. Dengan demikian perubahan ekonomi di negara maju akan mempengaruhi ekonomi negara berkembang dan sebaliknya.

Salah satu perubahan yang cukup penting adalah pergeseran global dalam produksi manufaktur. Pergeseran ini terjadi antara lain dengan berkurangnya pangsa (*share*) output negara maju (terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat) dan meningkatnya pangsa Jepang dan NICs. Sebagai ilustrasi Amerika Serikat pada tahun 1963 memproduksi 40% barang manufaktur, dan menurun menjadi 23% pada tahun 1983, sementara itu Jepang naik dari 5,5% menjadi 16% pada periode yang sama (Healey dan Ilbery 1990:288).

Pada saat yang bersamaan produksi bahan mentah terutama pertanian dan mineral telah secara relatif mengalami penurunan peran dalam sistem dunia. Harga relatif bahan mentah terus semakin merosot terhadap barang-barang manufaktur dan jasa. Hal ini sangat memukul negara-negara yang sedang berkembang, terutama bagi negara-negara yang sangat mengandalkan perekonomiannya pada produksi bahan mentah. Keadaan ini semakin memperkuat ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju. Kondisi ini dalam literatur ekonomi pembangunan telah dijelaskan jauh sebelumnya oleh para ahli ekonomi pembangunan seperti Gunnar Myrdal (1957), Paul Baran (1957), dan Andre Gunder Frank (1967), dengan teori ketergantungan (Dependency Theory).

Fenomena lain dari perubahan ekonomi dunia adalah berubahnya pola pembagian kerja dari cara lama ke cara baru atau yang dikenal dengan NIDL (*New International Division of Labour*). Dalam pola lama, yang ada adalah spesialisasi internasional ala Ricardo

dengan negara berkembang mengimpor barang manufaktur dan mengekspor barang mentah, dari dan ke negara maju. Dalam NIDL terdapat pola yang lebih kompleks dalam aliran perdagangan antar negara maju dan berkembang, yang memungkinkan adanya ekspor barang-barang manufaktur dari negara berkembang ke negara maju. Hal ini dimungkinkan karena NIDL merupakan sistem produksi berskala dunia, dengan mengintegrasikan ribuan bahkan jutaan orang ke dalam aktivitas produksi yang diatur oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Bagi negara maju NIDL telah menyebabkan suatu gejala yang disebut deindustrialisasi terutama di sektor tenaga kerja dengan semakin berkurangnya penggunaan tenaga kerja, dan menurunnya kegiatan industri manufaktur karena kalah bersaing dalam persaingan.

Adanya NIDL telah mengubah pola produksi dengan dimungkinkannya pemecahan proses produksi. Beberapa bagian dari mata rantai produksi dapat dilokasikan di tempat-tempat dengan pertimbangan biaya yang lebih murah. Sistem pemecahan proses produksi ini lebih dikenal dengan sistem produksi fleksibel. Hal ini memungkinkan produksi manufaktur di negara-negara berkembang dapat diekspor karena dapat bersaing di pasar internasional. NIDL yang dibawa oleh perusahaan transnasional telah dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa negara Asia Timur dan telah mendorong munculnya negara-negara industri baru (NICs) seperti Hongkong, Taiwan, Singapura, dan Korea.

Perubahan struktur geografi produksi dunia ternyata dibarengi dengan semakin lancarnya perekonomian jasa terutama sektor keuangan, asuransi, dan pemasaran. Mobilitas kapital antar negara sangat tinggi. Pergerakan ini sedemikian mobil dan mampu menentukan arah kegiatan ekonomi, sehingga beberapa tahun ini kita menyaksikan bahwa motor penggerak

perekonomian dunia bukanlah kegiatan di bidang produksi barang, tetapi kapital atau modal.

Fenomena lain yang cukup spektakuler adalah timbulnya regionalisasi perekonomian dunia ke dalam eksklusifitas regional seperti ditunjukkan oleh EU (European Union), NAFTA (North American Free Trade Area), AFTA (Asean Free Trade Area), dan APEC (Asia-Pacific Economic Co-operation). Kemunculan eksklusifisme ini pada mulanya lebih cenderung disebabkan oleh faktor politik, yaitu macetnya perundingan GATT Putaran Uruguay sejak 1986 karena buntunya diplomasi perdagangan tiga kekutan ekonomi yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Upaya pendekatan Amerika membentuk NAFTA, dan merangkul Jepang melalui APEC, telah memaksa Uni Eropa menyetujui prinsip GATT putaran Uruguay pada akhir tahun 1993. Pada tahun 2005 prinsip GATT ini akan berlaku efektif dan secara melembaga GATT menjadi WTO (World Trade Organization).

Pada tingkatan regional yang lebih sempit, juga telah muncul fenomena regionalisasi lokal, dengan memanfaatkan terbentuknya kerjasama antar perbatasan (transborder nodal regions). Hal ini muncul di sepanjang tepian Pasifik membentang dari Indonesia, sampai Jepang. Konsep segitiga pertumbuhan telah menjadi konsep pembangunan perbatasan (transborder development) dengan melibatkan beberapa wilayah region/propinsi suatu negara yang berbatasan, misalnya segitiga pertumbuhan Singapura-Johor-Riau, segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT) yang menyambungkan negara bagian sebelah utara Malaysia, propinsi di Thailand selatan, dan propinsi di Sumatera bagian utara, dan beberapa usulan kerjasama lokal di sekitar Cina, Korea dan Jepang, maupun Asean timur (Yann 1994:15). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi internasional telah mencapai tingkat yang semakin

besar, dan setiap region/ bagian wilayah suatu negara harus sudah siap untuk terjun langsung dalam kancah percaturan ekonomi dunia.

Dari fenomena-fenomena tadi secara umum telah terjadi ekspansi perekonomian dunia, dan masing-masing negara akan melakukan reaksi secara berbeda. Reaksi yang mungkin timbul dapat dilihat dari fenomena proteksionisme dari negara-negara yang justru menyerukan adanya perdagangan bebas seperti Amerika Serikat. Ketidakmampuan Amerika Serikat untuk bersaing lagi dalam produksi manufaktur telah menyebabkan pemerintah Amerika Serikat berusaha keras melakukan berbagai negosiasi bahkan mengancam untuk memberikan sanksi ekonomi dan memberlakukan *non tariff barrier*. Reaksi lain adalah adanya upaya untuk memproduksi produk-produk yang bersifat teknologi tinggi - *hitech*, dan produk-produk intelektual. Amerika Serikat memproduksi produk-produk tersebut karena masih memiliki keunggulan komparatif - *comparative advantage* di banding negara-negara lain. Sehingga Amerika Serikat berusaha keras untuk dapat melindungi berbagai produk unggulannya ini seperti terlihat dari berbagai negosiasi untuk perlindungan hak cipta untuk berbagai produk teknologi, buku, dan seni.

Bagi Indonesia penyesuaian terutama dengan mulai berlakunya kelembagaan ekonomi baru tersebut akan sangat mempengaruhi keberhasilan Indonesia dalam memainkan peranannya. Persoalannya ternyata tidak sederhana. Secara makro perekonomian Indonesia memang mempunyai landasan yang cukup mantap, tetapi tetap rawan dan kurang sehat. Mesin ekonomi Indonesia cepat sekali untuk memanas (*overheated*) meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi baru mencapai 7%. Hal ini disebabkan masih besarnya beban ekonomi biaya tinggi yang ditimbulkan oleh rente ekonomi dari sistem birokrasi, dan proteksi industri yang

justru memberatkan masyarakat konsumen dan industri hilir. Pada gilirannya hal ini akan mendorong masyarakat untuk cenderung melakukan investasi jangka pendek dan berbau spekulasi dan akibatnya mempercepat laju inflasi (Christianto Wibisono 1995:12).

AFTA akan berlaku efektif pada tahun 2003 dan mungkin dipercepat menjadi tahun 2000, WTO pada tahun 2005, dan APEC pada tahun 2020. Indonesia perlu segera mempersiapkan diri menyongsong kedatangan semua itu mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Indonesia baik secara nasional, maupun secara per regional/propinsi akan berhadapan langsung dengan pesaing langsung di tingkat internasional. Persiapan dan langkah yang ditempuh pada saat ini akan sangat menentukan keberadaan Indonesia, apakah akan menjadi salah satu pemain utama, pemain pelengkap, atau hanya sebagai penonton saja.

III. Konteks dan Prospek Pendidikan Perencanaan

Peranan dunia pendidikan yang utama di samping pengembangan ilmu, adalah penyiapan sumberdaya manusia. Dalam konteks dimulainya era perdagangan dan investasi bebas tahun 2020, ini berarti bahwa para penentu kebijakan dan para pelaku utama pada masa tersebut adalah mereka yang dididik pada masa sekarang (1990-an). Dengan demikian pendidikan pada saat ini menjadi krusial karena mempersiapkan orang-orang yang pada masanya nanti akan tampil menjadi pelaku utama dalam kancah kehidupan ekonomi yang mendunia.

Dalam konteks ekonomi yang mendunia atau paling tidak berkonteks regional, suatu program pendidikan perencanaan yang berorientasi pada pemecahan masalah dan resolusi konflik tidak akan banyak membantu bagi pembangunan suatu negara. Pola pendidikan perencanaan yang seperti ini dapat dipastikan hanya akan

menjadi pemain pinggiran atau marjinal. Yang diperlukan adalah pola pendidikan yang selain mampu menyumbang pada pemecahan masalah dan konflik, juga mampu menciptakan kemajuan dengan memberikan kesempatan untuk adanya pemikiran-pemikiran kreatif.

Pendidikan perencanaan yang dapat memenuhi kebutuhan tadi dapat diindikasikan melalui beberapa parameter antara lain: memastikan bahwa mahasiswa mengembangkan dan mempertajam kapasitas berpikir secara kritis dan terstruktur, memastikan bahwa mahasiswa yang akan memasuki dunia profesi akan dapat mempelajari tanggungjawab dan peran sosial yang diharapkan dari seorang profesional dalam kehidupan yang berubah ini, membantu mahasiswa memperoleh kompetensi dalam komunikasi dengan yang lain, dan dalam berurusan dengan pihak lain dan lembaga, diplomasi, dan kemampuan bernegosiasi (Colman 1993:19). Hal-hal tersebut tentu saja akan berimplikasi pada cara-cara pengajaran dan penyelenggaraan pendidikan yang mungkin memerlukan perubahan. Misalnya kita dapat mempertanyakan kembali apakah cara pengajaran lewat kelas perlu dikurangi dan lebih banyak memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih banyak langsung melihat ke dunia nyata/lapangan.

Dengan semakin terintegrasinya perekonomian Indonesia dengan dunia maka konteks perencanaan sudah dapat dipastikan akan mengalami perubahan besar terutama mulai tahun 2020. Beberapa konteks penting dari perubahan ini misalnya (Cuthbert 1994:2-3) perubahan kegiatan ekonomi yang didominasi oleh perekonomian dengan basis jasa dan perokonomian modern yang menjadi ranah (domain) dari sektor swasta. Dengan demikian diperlukan akomodasi bagi intervensi sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat berimplikasi pada berkurangnya agenda sosial dari perencanaan karena tuntutan

efisiensi, akuntabilitas, dan kompromi terhadap swasta.

Beberapa isu pokok berkaitan dengan implikasi perkembangan sosial ekonomi dunia terhadap dunia profesi dan pendidikan perencanaan anatara lain adalah:

a. Berubahnya Tataan Ruang Sosial.

Restrukturisasi ruang mungkin merupakan akibat paling nyata dari adanya perubahan struktur ekonomi dunia. Kota-kota di dunia akan dicirikan oleh kegiatan ekonomi berbasis jasa, didominasi oleh internasionalisasi produksi dengan melalui *new international division of labor*, dan persaingan, serta pentingnya peranan teknologi dan informasi. Tentu saja tingkat kemampuan masing-masing region dalam menanggapi hal itu akan menentukan kinerja region/kota. Hasilnya seperti terlihat, dalam konteks skala internasional, ada semacam pembagian kota-kota di tingkat dunia, misalnya munculnya London, New York, Tokyo sebagai kota pusat internasional bagi lokasi kantor pusat perusahaan-perusahaan besar berskala global. Kota-kota ini oleh Healey dan Ilbery (1990:8) dikategorikan sebagai *True International Centres*, sedangkan *Zonal Centres*, terutama adalah kota-kota yang memiliki fungsi hubungan keuangan dengan bagian belahan bumi lainnya, misalnya Los Angeles dan Singapura, dan *Regional Centres* merupakan tempat berdirinya kantor cabang regional bagi perusahaan yang melayani suatu wilayah khusus. Di tingkat mikro, perubahan struktur geografi akan nampak dari misalnya berubahnya kota dari yang bercirikan dominasi kegiatan produksi-konsumsi (*Keynesian City*) menjadi *Entrepreneurial City* yang bercirikan dominasi ekonomi jasa, pergerakan modal, internasionalisasi produksi, dan persaingan tajam.

Dalam konteks mikro, adanya NIDL akan sangat penting pengaruhnya terhadap struktur spasial dan lokasi kegiatan.

Pasokan (supply), kualitas, dan biaya tenaga kerja akan ikut mempengaruhi kemampuan suatu wilayah untuk bersaing. Suatu wilayah dengan pasokan tenaga kerja dengan kualitas yang mencukupi, dan relatif murah, akan mampu menarik investor bagi produk-produk dengan komponen biaya tenaga kerja relatif besar dan padat karya. Terkait dengan hal ini adalah munculnya fenomena siklus produksi dan siklus laba yang menunjukkan adanya pergerakan perpindahan perusahaan-perusahaan yang di suatu lokasi telah tidak menguntungkan lagi dan berpindah ke lokasi lain karena lokasi lama tidak lagi menguntungkan (lihat Healey dan Ilberry 1992:305-306)

Contoh lain dari berubahnya tataan ruang secara mikro adalah berubahnya kota ke arah fungsi jasa akan semakin menghidupkan pusat kota dan lokasi-lokasi lain yang strategis, yang berarti akan menimbulkan peningkatan permintaan tapak di lokasi-lokasi tersebut. Hal ini berakibat munculnya dominasi penggunaan lahan oleh sektor swasta. Kota-kota akan mengalami modifikasi yang sedemikian intensif yang mungkin akan menghilangkan ciri sosial, kultural, maupun kesukuan kota-kota tersebut (Cuthbert 1994). Meskipun tidak setiap perubahan ekonomi akan merubah tataan ruang, namun dapat dipastikan sebagian besar dari perubahan itu akan menuntut paling tidak penyesuaian. Beberapa kemungkinan perubahan ruang akan tercermin lewat pergeseran spesialisasi suatu region/kota. Tingkat keterbukaan suatu region terhadap pengaruh dari luar akan dapat menentukan kinerja ekonomi yang terlihat dari disparitas antar region. Penyesuaian dengan dunia luar juga akan menentukan posisi suatu kota dalam hirarki kota-kota baik dalam skala global maupun nasional (Moulaert dan Todling 1995).

b. Isu Keberlanjutan (sustainability).

Adanya keterbatasan daya dukung alam dan lingkungan, sementara tekanan dari

manusia terhadap lingkungan terus meningkat akan merupakan isu besar yang akan terus dihadapi manusia di bumi ini. Menurunnya sumberdaya alam yang tersedia berarti akan terjadi kompetisi penggunaan yang tersisa. Orang terus dituntut untuk melakukan efisiensi dengan berprinsip mengerjakan yang lebih banyak dengan sumberdaya yang lebih sedikit. Berubahnya geografi produksi dan konsumsi akan dapat memperkuat ketidakseimbangan global sebagaimana telah diindikasikan oleh Kelompok Roma dengan *Limits to Growth* di awal tahun 1970-an, dan studi lanjutannya 20 tahun kemudian *Beyond the Limits*. (1992).

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Brundlandt melalui *World Commission on Environment Development* pada tahun 1987. Pengertian *Sustainable* sebenarnya lebih dari sekedar perlindungan lingkungan, namun meliputi proses perubahan dalam eksploitasi sumberdaya, pengarahannya investasi, dan orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan, yang konsisten untuk kebutuhan sekarang dan masa depan (WCED 1987). Sejak saat itu *sustainability* telah menjadi isu global yang telah diadopsi dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan.

Upaya penterjemahan keberlanjutan dalam konteks regional telah dilakukan oleh Nijkamp dkk (1990) melalui konsep *Regional Sustainable Development* (RSD), suatu konsep yang selaras dengan konsep keberlanjutan global dari WCED. Menurut mereka, RSD dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi *Critical Factor Sources* (CFS) yang pada intinya adalah identifikasi sumberdaya regional dan karakternya, misalnya jumlah, kapan habis, aksesibilitas, dan lain-lain (Nijkamp dkk 1990). Para perencana dalam hal ini ditantang untuk dapat mengoperasionalkan konsep RSD ini dalam konteks masing-masing region melalui praktek perencanaan.

Konsep keberlanjutan dengan demikian adalah klimaks dari debat panjang pembangunan versus lingkungan, yang mau tidak mau akan melibatkan para perencana. Hal ini berimplikasi pada diperlukannya pengetahuan tentang manajemen sumberdaya dan lingkungan, terutama dengan penilaian lingkungan dan akuntansinya, manajemen sampah yang sangat akut bagi kota-kota. Dari sini muncul pula popularitas konsep manajemen pertumbuhan yang pada intinya merupakan upaya pengendalian pertumbuhan sehingga dapat tercapai kondisi pemanfaatan masa kini yang tidak merugikan generasi mendatang.

Dalam konteks persaingan yang tajam untuk memperebutkan sumberdaya yang terbatas, maka beberapa cara untuk bertahan dan keberlanjutan akan dilakukan. Persaingan dan konflik untuk mencapai supremasi ekonomi antar bangsa, juga dapat terjadi dalam satu negara, baik antar region maupun antar kota. Dalam konteks kota maka berbagai upaya untuk tampil beda akan dilakukan dengan menambahkan atribut-atribut tertentu sebagai citra suatu kota baik riil maupun imajiner untuk bersaing dengan kota lain dalam menarik investasi dan modal. Kota-kota yang relatif sudah dikenal sebagai *Events City*, secara relatif telah memiliki keunggulan komparatif dalam menarik investasi. Misalnya kota-kota yang mampu menyelenggarakan acara penting olahraga (Olimpiade, World Cup, Grand Prix, dan lain-lain), kesenian dan fashion/mode, secara relatif akan tetap memiliki kemampuan untuk menarik pengunjung secara teratur yang berarti permintaan potensial akan selalu ada.

c. Isu Perencanaan Partisipatif (participatory planning) vs Rasionalisme Ekonomi

Meskipun di Indonesia mekanisme untuk partisipasi dalam perencanaan bagi publik belum jelas dan relatif terbatas, namun dapat diperkirakan di masa-masa

mendatang tuntutan partisipasi akan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan demokratisasi. Pola perencanaan yang tidak melibatkan unsur masyarakat (*grass root*) nampaknya akan mulai ditinggalkan dan tidak dapat diterima lagi oleh anggota masyarakat. Masyarakat juga ingin menentukan kualitas lingkungan di sekitar mereka sendiri. Hal ini berarti pula perencana akan menghadapi suatu masyarakat yang kritis (juga kepada pemerintah) (Colman 1990). Di satu sisi hal ini akan berakibat positif dalam bentuk terakomodasinya keinginan masyarakat untuk ikut membangun lingkungan yang dikehendaki. Namun sisi lain adalah dibutuhkannya prosedur yang lebih baik dan lebih panjang untuk membangun suatu lingkungan. Beberapa kasus pembangunan yang selama ini ada justru menjadi trauma bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat dipastikan akan lebih banyak bersikap konservatif dibanding keinginan aktor lain (terutama sektor bisnis) yang lebih progresif. Tanpa mekanisme partisipasi yang transparan, dapat diduga bahwa pola yang selama ini ada dalam pembangunan justru akan menjauhkan jarak antar aktor pembangunan dan menimbulkan rasa saling curiga.

Perencanaan partisipatif yang meningkat ternyata diiringi pula dengan munculnya paham rasionalisme ekonomi, yang muncul sebagai akibat dari keterbatasan pembiayaan dan manajemen yang dihadapi pemerintah, maupun tuntutan efisiensi dan skala pelayanan oleh masyarakat. Fenomena ini ditandai dengan munculnya mekanisme swastanisasi, deregulasi, dan kemitraan pemerintah swasta, yang menyangkut kepentingan kolektif. Gejala rasionalisme ekonomi ini begitu kuat menggejala, yang berarti peran perencana sebagai penjaga barang-barang publik, akan semakin berkurang. Agenda sosial para perencana dengan demikian harus dibagi dengan kepentingan kelompok swasta. Dalam posisi demikian, perencana harus dapat menjadi agen yang memiliki

tempat berpijak dan mengambil posisi, dalam arti mampu melakukan negosiasi dengan kepentingan modal, sehingga tidak terperosok hanya menjadi setingkat mekanik yang dipergunakan keahliannya untuk membangun sistem tanpa punya andil yang berarti.

IV. Implikasi Pengembangan Kurikulum dan Pengajaran

Salah satu tema sentral dalam falsafah pendidikan adalah tujuan pendidikan itu sendiri. Secara umum tujuan pendidikan perencanaan kurang lebih adalah: menghasilkan orang-orang terdidik secara umum dan dalam bidang perencanaan; mengembangkan kapasitas untuk dapat berinteraksi dengan proses perencanaan; memberikan landasan yang kuat (*solid*) untuk memahami proses sosial-ekonomi-politik yang mempengaruhi perubahan lingkungan spasial dan perlunya intervensi perencanaan; menyeimbangkan antara teori, metode, teknologi dan praktek; dan memberikan kesempatan kepada spesialisasi, serta pemenuhan minat individu (lihat Rodriguez-Bachiller 1988)

Perubahan yang terjadi pada era baru akan membawa retorika baru bagi dunia perencanaan. Retorika ini muncul hampir dari setiap lini baik itu ekonomi, lingkungan dan sumberdaya, teknologi informasi, pemerintah, dan juga dari masyarakat. Hal ini mendorong kita untuk merenungkan kembali mengenai konsepsi perencanaan maupun konsepsi perencana. Dengan adanya perubahan pola pikir dan nilai masyarakat, sudah saatnya kita bertanya apakah pengertian perencanaan, cara pengajaran, teknik dan metoda yang kita pergunakan untuk merencana wilayah dan kota masih relevan. Pada era baru ini yang diperlukan adalah bagaimana dunia pendidikan perencanaan dapat sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi. Jika tidak dan memerlukan penyesuaian, berarti kita harus siap mengembangkan teknik dan prosedur atau metodologi baru sesuai dengan kebutuhan.

Tidak kalah penting adalah konsepsi mengenai perencana itu sendiri yang juga perlu dipertanyakan. Perencana dengan atribut macam apa yang diharapkan untuk masa-masa mendatang ini? Menurut Cuthbert (1994:13) perencana yang akan dapat berfungsi dengan baik haruslah mereka yang mampu menjadi arsitek fleksibilitas, yang diindikasikan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- *generalis*, yaitu memiliki landasan teoritis yang kuat dalam bidang sosial-ekonomi yang memungkinkan mereka mengerti dinamika perekonomian dunia dan posisi mereka.
- *spesialis*, yaitu mampu memberikan kontribusi melalui keahlian khusus jika bekerja dalam tim perencanaan
- *negosiator* dalam arti mampu melakukan kontrak dan juga mempertemukan antara kepentingan masyarakat, pemerintah, dan swasta
- *pragmatis*, yaitu siap memahami dunia nyata, mengerti adanya berbagai kepentingan, dan mengerti bahwa dunia nyata tidak hanya untuk direncanakan tapi juga untuk dibangun.

Bentuk baru sosial-ekonomi yang melingkupi suatu masyarakat atau negara sudah barang tentu akan mempengaruhi isi dan cara pengajaran pendidikan perencanaan. Perubahan yang cepat dalam kehidupan masyarakat akan berimplikasi pula pada perubahan yang cepat dalam praktek dan pengajaran pendidikan perencanaan. mungkin sekali cara pengajaran, dan teknik perencanaan yang saat ini diajarkan sudah kurang relevan dan tidak mencukupi. Hubungan antara ekonomi dan teori serta praktek perencanaan ruang perlu ditinjau kembali. Dengan demikian diperlukan suatu kurikulum yang fleksibel, dalam arti siap untuk beradaptasi, mau berubah dan mungkin jika diperlukan redefinisi isi kuliah. Di sini dunia pendidikan perlu menciptakan teknik, prosedur, atau hukum baru yang dapat memenuhi kebutuhan.

Dalam konteks penyesuaian dengan dunia yang berubah, beberapa pertimbangan penting yang perlu diacu dalam pengembangan kurikulum pendidikan perencanaan antara lain:

- a. perlunya penajaman landasan teoritik terutama yang berkaitan dengan kajian kontekstual seperti geografi, sosiologi, dan ekonomi politik ruang atau yang lebih dikenal dengan *urban studies*. Sebagai contoh, penguatan kajian teori sistem dunia, pembagian kerja internasional, kaitan struktur sosial dan struktur ruang, ekonomi negara maju dan berkembang, sejarah perkembangan kota-kota, akan mempermudah anak didik memahami gerak perubahan sosial-ekonomi dunia dan implikasinya bagi tatanan ruang.
- b. memberikan kesempatan yang seluas mungkin kepada anak didik untuk berhadapan langsung dan berdialog langsung dengan kenyataan di lapangan baik di lingkungan pemerintah, maupun swasta dan masyarakat.
- c. keterbatasan sumberdaya setiap sekolah dan semakin kompleksnya persoalan memerlukan disatukannya penelitian, pengajaran, dan praktek menjadi suatu rangkaian. Hal ini akan sangat membantu terutama pada lembaga pendidikan yang belum memiliki kebiasaan riset yang baik disebabkan kurangnya sumberdaya dan beban mengajar yang berat.
- d. penggunaan pendidikan berbasis komputer terutama dalam kaitannya dengan sistem informasi. Penggunaan komputer memungkinkan penggunaan berbagai sistem permainan (*game*) dan latihan simulasi yang lebih bervariasi terutama untuk membantu memberikan kesempatan dalam latihan mediasi dan negosiasi dan kerjasama.

- e. dalam era pergerakan kapital sebagai motor pembangunan, maka penawaran program spesialisasi yang mendukung upaya pemahaman perubahan struktur ruang sebagai akibat berlokasinya lembaga-lembaga terkait seperti asuransi, perkantoran, hotel, hiburan, dan sebagainya akan menjadi sangat relevan dan penting. Spesialisasi dalam rancang kota dan *real estate* mungkin penting untuk ditawarkan.

Selain itu bagi mereka yang bekerja menjadi praktisi, dunia pendidikan perlu mengajak mereka untuk memberikan masukan aspek praktis perencanaan, dan dunia pendidikan dapat menawarkan jenis pendidikan yang lebih bersifat kursus singkat maupun kursus khusus mengenai topik-topik terbaru dalam dunia perencanaan sehingga dapat kembali menyegarkan dan memperluas cakrawala pemikiran para perencana tersebut.

Dalam arena kehidupan yang mendunia dan tingkat saling ketergantungan yang tinggi adalah tidak mungkin bagi suatu sekolah untuk menganggap dirinya yang paling mengerti semuanya. Hal ini berarti bahwa keberadaan institusi pendidikan akan merupakan komponen yang saling melengkapi sesuai dengan kekuatan masing-masing. Sehingga bantuan dari satu pihak kepada yang lain akan sangat diperlukan. Hal ini akan diperoleh melalui terbentuknya jaringan yang merupakan salah satu cara untuk memperkuat sumberdaya.

Tentu saja pembentukan jaringan ini tidak terbatas hanya antar institusi pendidikan perencanaan, namun juga perlu dilakukan dengan dunia praktisi, lembaga-lembaga pemerintah, dan juga kelompok masyarakat, dan institusi pendidikan dengan disiplin lain. Melalui jaringan ini terciptalah kesempatan untuk mengajak praktisi luar ke dalam dunia akademik, yang tidak harus melulu pendidik sambilan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pengajar penuh. Dalam kapasitas seperti

ini para praktisi tersebut akan dapat menjadi sumber ide baru, sumber kritik, sekaligus mengatasi kekurangan sumberdaya manusia.

V. Kesimpulan

Globalisasi dan regionalisasi ekonomi akan mewarnai peta perekonomian dunia di masa-masa mendatang, yang akan berimplikasi pada setiap aspek kehidupan manusia. Bentuk baru perkembangan ekonomi dan sosial ini dapat dipastikan akan mempengaruhi teori, praktek, dan pengajaran perencanaan.

Apapun perubahan yang akan terjadi di dunia, sudah seharusnya kinerja utama dari seorang perencana dan calon perencana dicirikan oleh berpikir kritis, dan kinerja profesional. Hal ini dapat dilakukan jika anak didik dibekali dengan kemampuan memahami gerak perubahan ekonomi dan masyarakat, pengusaha teknik praktis perencanaan, dan kemampuan khusus untuk memberikan sumbangan dalam tim kerja.

Pendidikan perencanaan harus mempunyai tanggapan yang positif terhadap perubahan dunia dan sosial. Hal ini berarti menjadi persyaratan bagi setiap institusi pendidikan perencanaan untuk melakukan apresiasi terhadap bentuk-bentuk dan praktek perubahan sosial. Misalnya dalam konteks berubahnya mekanisme pembangunan yang mengarah ke upaya swastanisasi dan kerjasama pemerintah-swasta. Dengan demikian praktek perencanaan akan semakin terikat dengan pola-pola kerjasama pemerintah-swasta maupun swastanisasi tersebut. Namun hal ini tidak berarti bahwa perencanaan hanya menjadi alat dari pemerintah saja atau swasta saja.

Pendidikan yang baik sudah semestinya mempunyai keinginan untuk menggalang dan menjalin jaringan dan pertukaran informasi antar sekolah perencanaan. Interaksi dengan disiplin ilmu lain seperti ekonomi, sains dan teknik, dan mungkin

bidang kedokteran dan kesehatan, akan semakin diperlukan untuk dapat mempersiapkan anak didik menjadi perencana yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan misalnya melalui pengajaran interdisipliner dan riset bersama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Christianto Wibisono, 1995. *Prognosa 1995: Ekonomi Indonesia Era WTO/APEC*, Telstra No 32.
2. Cuthbert R., Alexander, 1994. *Flexible Production - Flexible Education?* Makalah disampaikan pada "Planning Education Workshop", Queensland University of Technology, Brisbane, 24-26 September 1994.
3. Colman, James, 1993. "Planning Education in the 90s", Australian Planner, March.
4. Healey J. Michael dan Brian W. Ilbery, 1990. *Location and Change: Perspectives on Economic Geography*, Oxford University Press.
5. Meadows H. Donella, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, 1992. *Beyond The Limits: Global Collapse or Sustainable Future*, Earthscan Publication Limited, London.
6. Moulaert, F. and F. Todtling (eds), 1995. *The Geography of Advanced Producer Services in Europe*, Progress in Planning, Vol. 43, April/June.
7. Nijkamp, Peter et.al, 1990. *Regional Sustainable Development and Natural Resource Use*, Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics.
8. Rodriguez-Bachiller, Agustin, 1988. *Town Planning Education*, Gower Publishing Company Limited, Aldershot.
9. World Commission on Environment and Development, Brundlant Commission, 1987. *Our Common Future*, Oxford University Press.
10. Yann, Wong Shuang, 1994. "Globalization and Regionalization: The Shaping of New Economic Regions in Asia and Pacific", Regional Development Dialogue, 15(1).